



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pramono Anung

Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 29 Januari 2016  
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

  
Pramono Anung

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016  
SEKRETARIAT KABINET**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas	1. Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh pemerintah	100%
		2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti	100%
		3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	100%
2.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Persidangan Kabinet	1. Persentase kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet	100%
		2. Persentase kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
3.	Terwujudnya Peningkatan Layanan Sistem dan Teknologi Informasi Sekretariat Kabinet	1. Jumlah pengakses <i>website</i> Sekretariat Kabinet	1.900.0000 pengakses
		2. Jumlah <i>pen-download</i> layanan data/informasi Sekretariat Kabinet	800.000 pen- <i>download</i>
		3. Persentase kepuasan pengakses terhadap layanan <i>website</i> Sekretariat Kabinet	90%
		4. Persentase kepuasan terhadap penyebaran informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet	100%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan	Rp14.000.000.000,00
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet	Rp16.578.894.000,00
Total Anggaran	Rp30.578.894.000,00

Jakarta, 29 Januari 2016  
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia



Priono Anung



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fadlansyah Lubis

Jabatan : Deputy Bidang Politik, Hukum dan Keamanan  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Pramono Anung

Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

  
Pramono Anung

Jakarta, 29 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Deputy Bidang Politik, Hukum  
dan Keamanan

  
Fadlansyah Lubis

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	100%
		2. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disusun secara tepat waktu	100%
		3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	100%
		4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disusun secara tepat waktu	100%
		5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	100%

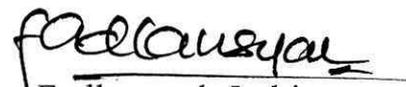
No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
		6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disusun secara tepat waktu	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Politik Dalam Negeri	Rp850.000.000,00
2. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	Rp900.000.000,00
3. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan Internasional	Rp900.000.000,00
4. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika	Rp850.000.000,00
<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp3.500.000.000,00</b>

Pihak Kedua,  
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

  
Pramono Anung

Jakarta, 29 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan  
Keamanan

  
Fadlansyah Lubis



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agustina Murbaningsih  
Jabatan : Deputy Bidang Perekonomian  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Pramono Anung  
Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Jakarta, 29 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Deputi Bidang Perekonomian

Pramono Anung

Agustina Murbaningsih

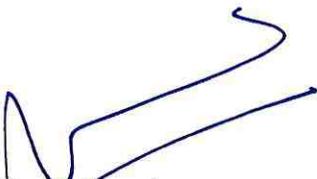
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016  
DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(3)
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Perekonomian	1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	100%
		2. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian yang disusun secara tepat waktu	100%
		3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	100%
		4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Perekonomian yang disusun secara tepat waktu	100%
		5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	100%

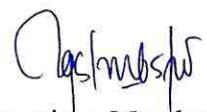
No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
		6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perekonomian yang disusun secara tepat waktu	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	Rp850.000.000,00
2. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan	Rp900.000.000,00
3. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri	Rp850.000.000,00
4. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp850.000.000,00
Total	Rp3.450.000.000,00

Pihak Kedua,  
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

  
Pramono Anung

Jakarta, 29 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Deputi Bidang Perekonomian

  
Agustina Murbaningsih



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Surat Indrijarso

Jabatan : Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan  
Kebudayaan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Pramono Anung

Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

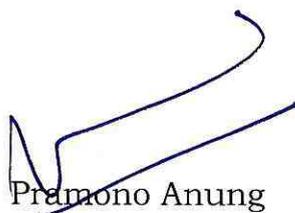
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

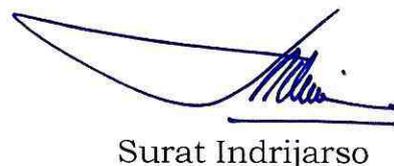
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Jakarta, 29 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Deputi Bidang Pembangunan Manusia  
dan Kebudayaan



Pramono Anung



Surat Indrijarso

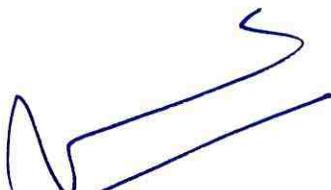
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016  
DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN  
KEBUDAYAAN**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	100%
		2. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disusun secara tepat waktu	100%
		3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	100%
		4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disusun secara tepat waktu	100%
		5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	100%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
		6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disusun secara tepat waktu	100%

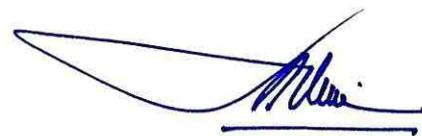
Kegiatan	Anggaran
1. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga	Rp900.000.000,00
2. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Rp800.000.000,00
3. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Rp800.000.000,00
4. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Rp800.000.000,00
<b>Total</b>	<b>Rp3.300.000.000,00</b>

Pihak Kedua,  
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia



Pramono Anung

Jakarta, 29 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Deputi Bidang Pembangunan  
Manusia dan Kebudayaan



Surat Indrijarso



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ratih Nurdiati

Jabatan : Deputy Bidang Kemaritiman  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Pramono Anung

Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Pramono Anung

Jakarta, 29 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Deputi Bidang Kemaritiman

Ratih Nurdiati

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016  
DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Kemaritiman	1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	100%
		2. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat waktu	100%
		3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	100%
		4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat waktu	100%
		5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	100%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
		6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat waktu	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp650.000.000,00
2. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp900.000.000,00
3. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Perhubungan	Rp650.000.000,00
4. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi dan Lingkungan Maritim	Rp1.550.000.000,00
Total	Rp3.750.000.000,00

Pihak Kedua,  
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia



Pramono Anung

Jakarta, 29 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Deputi Bidang Kemaritiman



Ratih Nurdiati



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuli Harsono

Jabatan : Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet  
selanjutnya disebut pihak pertama

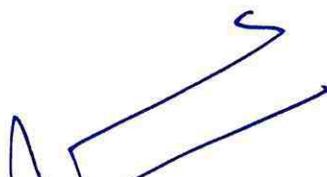
Nama : Pramono Anung

Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia



Pramono Anung

Jakarta, 29 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Deputy Bidang Dukungan  
Kerja Kabinet



Yuli Harsono

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016  
DEPUTI BIDANG DUKUNGAN KERJA KABINET**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(3)
1.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, Penyiapan Naskah dan Penerjemahan, serta Pelaksanaan Hubungan Kemasyarakatan dan Keprotokolan	1. Persentase kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet	100%
2. Persentase kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet		100%	
3. Persentase Pejabat Fungsional Penerjemah yang dibina sesuai rencana		100%	
4. Persentase kepuasan terhadap penyebarluasan informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet		100%	
5. Persentase kepuasan terhadap layanan keprotokolan kepada Sekretaris Kabinet dalam rangka dukungan kegiatan yang dihadiri oleh Presiden		100%	

Kegiatan	Anggaran
1. Penyelenggaraan Dukungan Teknis dan Administrasi Penyiapan Bahan-Bahan Sidang Kabinet maupun Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	Rp3.844.470.000,00
2. Dukungan Pelaporan Sidang Kabinet maupun Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	Rp2.044.530.000,00
3. Dukungan Penyiapan Naskah Dokumen Kepresidenan dan Kenegaraan serta Penerjemahan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah	Rp2.611.000.000,00
4. Dukungan Penyelenggaraan Hubungan Kemasyarakatan serta Koordinasi dan Penyiapan Protokol Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Sekretaris Kabinet serta Koordinasi Pelaksanaan Keprotokolan Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden	Rp4.612.070.000,00
Total Anggaran	Rp13.112.070.000,00

Pihak Kedua,  
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia



Priono Anung

Jakarta, 29 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Deputi Bidang Dukungan  
Kerja Kabinet



Yuli Harsono



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farid Utomo

Jabatan : Deputy Bidang Administrasi  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Pramono Anung

Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Jakarta, 29 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Deputi Bidang Administrasi

  
Pramono Anung

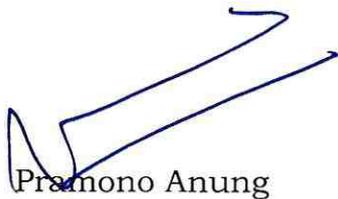
  
Farid Utomo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016  
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya Kelancaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Tugas Sekretaris Kabinet dan Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet	1. Persentase kepuasan terhadap dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Administrasi  2. Kualitas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet berdasarkan Opini Badan Pemeriksa Keuangan  3. Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Kabinet  4. Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	85%  WTP  B  67

Kegiatan	Anggaran
1. Dukungan Manajemen Perencanaan dan Keuangan serta Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Rp3.638.308.000,00
2. Dukungan Manajemen Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Rp108.239.139.000,00
3. Dukungan Manajemen Kinerja Organisasi dan Individu, Reformasi Birokrasi, serta Pengendalian Persuratan dan Ketatausahaan Pimpinan	Rp1.309.437.000,00
4. Pelaksanaan Pelayanan Pengadaan, Pengelolaan Barang Milik Negara, Pemeliharaan, Perlengkapan dan Jamuan Pelayanan Umum Lainnya di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Rp43.102.195.000,00
Total Anggaran	Rp156.289.079.000,00

Pihak Kedua,  
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia



Pramono Anung

Jakarta, 29 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Deputi Bidang Administrasi



Farid Utomo



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Amperawan

Jabatan : Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Pramono Anung

Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Jakarta, 29 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Staf Ahli Bidang Perekonomian dan  
Kesejahteraan Rakyat



Pramono Anung



M. Amperawan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016  
STAF AHLI BIDANG PEREKONOMIAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT**

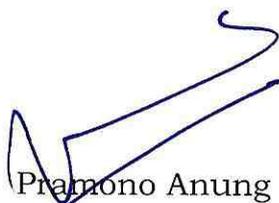
No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya Rekomendasi Terhadap Isu Strategis di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas	Persentase rekomendasi terhadap isu strategis di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Pengumpulan dan Pengolahan Data	Rp340.800.000,00
2. Rapat Koordinasi Staf Ahli Kementerian di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Rp1.000.000,00
3. FGD/Diskusi Terbatas	Rp58.200.000,00
<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp400.000.000,00</b>

Jakarta, 29 Januari 2016

Pihak Kedua,  
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Pihak Pertama,  
Staf Ahli Bidang Perekonomian dan  
Kesejahteraan Rakyat

  
Pramono Anung

  
M. Amperawan



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wasit Saronto  
Jabatan : Staf Ahli Bidang Komunikasi  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Pramono Anung  
Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia



Pramono Anung

Jakarta, 29 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Staf Ahli Bidang Komunikasi



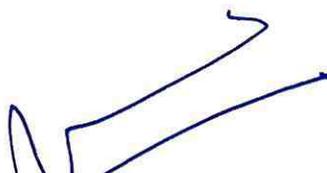
Wasit Saronto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016  
STAF AHLI BIDANG KOMUNIKASI**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya Rekomendasi Terhadap Isu Strategis di Bidang Komunikasi yang Berkualitas	Persentase rekomendasi terhadap isu strategis di Bidang Komunikasi yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Pengumpulan dan Pengolahan Data	Rp340.800.000,00
2. Rapat Koordinasi Staf Ahli Kementerian di Bidang Komunikasi	Rp1.000.000,00
3. FGD/Diskusi Terbatas	Rp58.200.000,00
<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp400.000.000,00</b>

Pihak Kedua,  
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia



Pranono Anung

Jakarta, 29 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Staf Ahli Bidang Komunikasi



Wasit Saronto



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M.Y. Raso

Jabatan : Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Pramono Anung

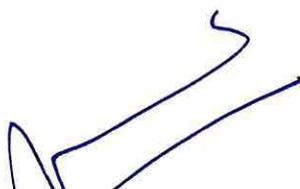
Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Jakarta, 29 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi



Pramono Anung



M. Y. Raso

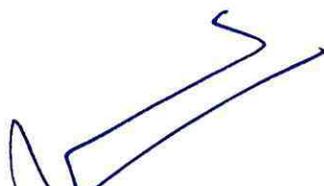
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016  
STAF AHLI BIDANG REFORMASI BIROKRASI**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya Rekomendasi Terhadap Isu Strategis di Bidang Reformasi Birokrasi yang Berkualitas	Persentase rekomendasi terhadap isu strategis di Bidang Reformasi Birokrasi yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Pengumpulan dan Pengolahan Data	Rp340.800.000,00
2. Rapat Koordinasi Staf Ahli Kementerian di Bidang Reformasi Birokrasi	Rp1.000.000,00
3. FGD/Diskusi Terbatas	Rp58.200.000,00
<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp400.000.000,00</b>

Pihak Kedua,  
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Jakarta, 29 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi

  
Pramono Anung

  
M.Y. Raso



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Satya Bhakti Parikesit

Jabatan : Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional selanjutnya disebut pihak pertama

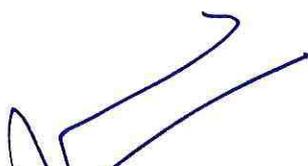
Nama : Pramono Anung

Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

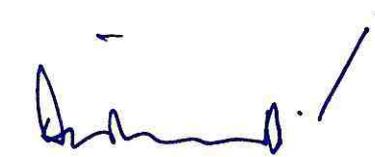
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia



Pramono Anung

Jakarta, 25 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Staf Ahli Bidang Hukum dan  
Hubungan Internasional



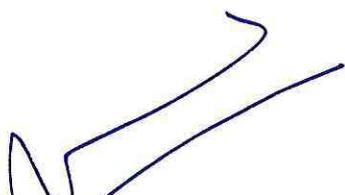
Satya Bhakti Parikesit

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016  
STAF AHLI BIDANG HUKUM DAN  
HUBUNGAN INTERNASIONAL**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya Rekomendasi Terhadap Isu Strategis di Bidang Hukum dan Hubungan Internasional yang Berkualitas	Persentase rekomendasi terhadap isu strategis di Bidang Hukum dan Hubungan Internasional yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Pengumpulan dan Pengolahan Data	Rp340.800.000,00
2. Rapat Koordinasi Staf Ahli Kementerian di Bidang Hukum dan Hubungan Internasional	Rp1.000.000,00
3. FGD/Diskusi Terbatas	Rp58.200.000,00
Total Anggaran	Rp400.000.000,00

Pihak Kedua,  
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

  
Pramono Anung

Jakarta, 29 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Staf Ahli Bidang Hukum dan  
Hubungan Internasional

  
Satya Bhakti Parikesit



SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dyah Pancaningrum  
Jabatan : Asisten Deputy Bidang Politik Dalam Negeri

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadlansyah Lubis  
Jabatan : Deputy Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Deputy Bidang Politik,  
Hukum, dan Keamanan

  
Fadlansyah Lubis

Jakarta, 29 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Asisten Deputy Bidang  
Politik Dalam Negeri

  
Dyah Pancaningrum

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Politik Dalam Negeri	1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Politik Dalam Negeri yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam	100%
		2. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Politik Dalam Negeri yang disusun secara tepat waktu	100%
		3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Politik Dalam Negeri yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam	100%
		4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Politik Dalam Negeri yang disusun secara tepat waktu	100%
		5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Politik Dalam Negeri yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam	100%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
		6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Politik Dalam Negeri yang disusun secara tepat waktu	100%

Kegiatan

Anggaran

Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Politik Dalam Negeri

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Politik Dalam Negeri          | Rp795.376.000,00 |
| 2. Penyusunan Rekomendasi atas Izin Prakarsa di Bidang Politik Dalam Negeri | Rp42.024.000,00  |
| 3. Penyusunan Materi Sidang Kabinet di Bidang Politik Dalam Negeri          | Rp12.600.000,00  |

Total Anggaran

Rp850.000.000,00

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Politik,  
Hukum, dan Keamanan

  
Fadlansyah Lubis

Jakarta, 29 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang  
Politik Dalam Negeri

  
Dyah Pancaningrum



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roby Arya Brata  
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara

selanjutnya disebut pihak pertama

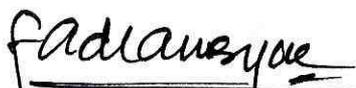
Nama : Fadlansyah Lubis  
Jabatan : Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Politik,  
Hukum, dan Keamanan

  
Fadlansyah Lubis

Jakarta, 29 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang  
Hukum, HAM, dan Aparatur Negara

  
Roby Arya Brata

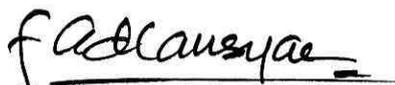
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**ASISTEN DEPUTI BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA,**  
**DAN APARATUR NEGARA**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(3)
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam	100%
		2. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disusun secara tepat waktu	100%
		3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam	100%
		4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disusun secara tepat waktu	100%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
		5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukum	100%
		6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disusun secara tepat waktu	100%
2.	Terwujudnya Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi yang Berkualitas di Lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Persentase penyelesaian dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan secara tepat waktu	100%

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	
1. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	Rp751.890.000,00
2. Penyusunan Rekomendasi terkait Permohonan Persetujuan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Rp38.592.000,00
3. Penyusunan Rekomendasi terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat, atau Pertemuan yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	Rp97.818.000,00
4. Penyusunan Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Kedepastian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Rp11.700.000,00
Total Anggaran	Rp900.000.000,00

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Politik,  
Hukum, dan Keamanan

  
Fadlansyah Lubis

Jakarta, 29 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang  
Hukum, Hak Asasi Manusia, dan  
Aparatur Negara

  
Roby Arya Brata



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Johar Arifin  
Jabatan : Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadlansyah Lubis  
Jabatan : Deputy Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

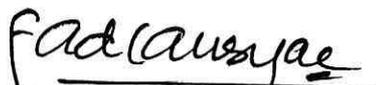
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Politik, Hukum,  
dan Keamanan

Jakarta, 29 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Asisten Deputy Bidang Hubungan  
Internasional

  
Fadlansyah Lubis

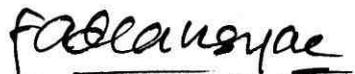
  
Johar Arifin

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Hubungan Internasional	1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Hubungan Internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukum.	100%
		2. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Hubungan Internasional yang disusun secara tepat waktu.	100%
		3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Hubungan Internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukum.	100%
		4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Hubungan Internasional yang disusun secara tepat waktu.	100%
		5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Hubungan Internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukum.	100%
		6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Hubungan Internasional yang disusun secara tepat waktu.	100%

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan Internasional	
1. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Hubungan Internasional	Rp501.598.000,00
2. Penyusunan Rekomendasi atas Izin Prakarsa dan Substansi RPUU di Bidang Hubungan Internasional	Rp63.388.000,00
3. Penyusunan Materi Sidang Kabinet di Bidang Hubungan Internasional	Rp335.014.000,00
Total Anggaran	Rp900.000.000,00

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan  
Keamanan,

  
Fadlansyah Lubis

Jakarta, 29 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang Hubungan  
Internasional

  
Johar Arifin



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Edwin Jeffry Herald Wuisang

Jabatan : Asisten Deputy Bidang Pertahanan, Keamanan,  
Komunikasi dan Informatika

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadlansyah Lubis

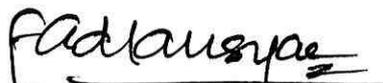
Jabatan : Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

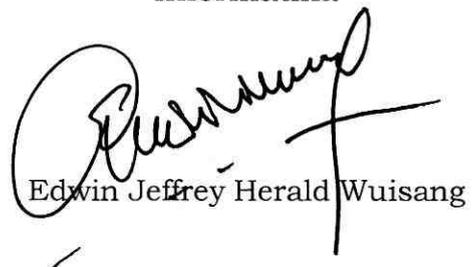
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Deputy Bidang Politik, Hukum,  
dan Keamanan

  
Fadlansyah Lubis

Jakarta, 29 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Asisten Deputy Bidang Pertahanan,  
Keamanan, Komunikasi dan  
Informatika

  
Edwin Jeffry Herald Wuisang

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN,**  
**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika	1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam	100%
		2. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika yang disusun secara tepat waktu	100%
		3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam	100%
		4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika yang disusun secara tepat waktu	100%
		5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam	100%

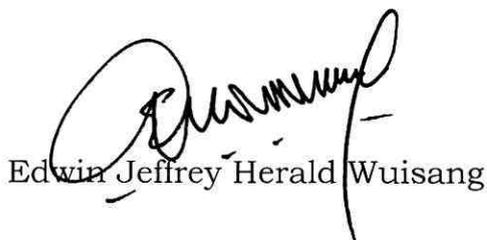
No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
		6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika yang disusun secara tepat waktu	100%

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	
1. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	Rp734.512.000,00
2. Penyusunan Rekomendasi terkait Permohonan Persetujuan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan PUU di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	Rp62.972.000,00
3. Penyiapan Rekomendasi terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat, atau Pertemuan di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	Rp52.516.000,00
<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp850.000.000,00</b>

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Politik,  
Hukum, dan Keamanan

  
Fadlansyah Lubis

Jakarta, 29 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang Pertahanan,  
Keamanan, Komunikasi dan  
Informatika

  
Edwin Jeffrey Herald Wuisang



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diana Irawati

Jabatan : Asisten Deputy Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Agustina Murbaningsih

Jabatan : Deputy Bidang Perekonomian

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Januari 2016

Pihak Kedua,  
Deputy Bidang Perekonomian

Pihak Pertama,  
Asisten Deputy Bidang Ekonomi Makro,  
Penanaman Modal dan Badan Usaha

Agustina Murbaningsih

Diana Irawati

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**ASISTEN DEPUTI BIDANG EKONOMI MAKRO, PENANAMAN**  
**MODAL DAN BADAN USAHA**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang berkualitas di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha	1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%
		2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha yang disusun secara tepat waktu	100%
		3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%
		4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha yang disusun secara tepat waktu	100%
		5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
		6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha yang disusun secara tepat waktu	100%

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	
1. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	Rp558.633.400,00
2. Penyusunan Rekomendasi Persetujuan atas Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan PUU di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	Rp159.982.600,00
3. Penyiapan Rekomendasi terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat, atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	Rp131.384.000,00
<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp850.000.000,00</b>

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Perekonomian

  
Agustina Murbaningsih

Jakarta, 29 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro,  
Penanaman Modal dan Badan Usaha

  
Diana Irawati



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulyati Kristina

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Agustina Murbaningsih

Jabatan : Deputi Bidang Perekonomian

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Perekonomian

Jakarta, 29 Januari 2016

Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang Perdagangan,  
Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan

Agustina Murbaningsih

Yulyati Kristina

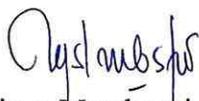
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**ASISTEN DEPUTI BIDANG PERNIAGAAN, KEWIRAUSAHAAN,**  
**DAN KETENAGAKERJAAN**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan	1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%
		2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang disusun secara tepat waktu	100%
		3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%
		4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang disusun secara tepat waktu	100%
		5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%
		6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang disusun secara tepat waktu	100%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
2.	Terwujudnya Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi yang Berkualitas di Lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian	Persentase dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian yang disusun secara tepat waktu	100%

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan	
1 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan	Rp718.768.000,00
2 Penyusunan Rekomendasi Persetujuan Atas Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi RPUU di Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan	Rp66.708.000,00
3 Penyusunan Rekomendasi Terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan	Rp41.224.000,00
4 Penyusunan Dokumen Program dan Anggaran serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Deputi Bidang Perekonomian	Rp73.300.000,00
<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp900.000.000,00</b>

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Perekonomian

  
Agustina Murbaningsih

Jakarta, 29 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang Perniagaan,  
Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan

  
Yulyati Kristina



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Muis

Jabatan : Asisten Deputy Bidang Percepatan Infrastruktur,  
Pengembangan Wilayah dan Industri  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Agustina Murbaningsih

Jabatan : Deputy Bidang Perekonomian  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Januari 2016

Pihak Kedua,

Deputy Bidang Perekonomian

Pihak Pertama,

Asisten Deputy Bidang Percepatan Infrastruktur,  
Pengembangan Wilayah dan Industri

Agustina Murbaningsih

Abdul Muis

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**ASISTEN DEPUTI BIDANG PERCEPATAN INFRASTRUKTUR,**  
**PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INDUSTRI**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri	1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%
		2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang disusun secara tepat waktu	100%
		3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%
		4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang disusun secara tepat waktu	100%
		5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%

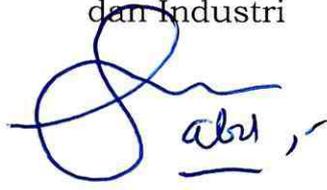
No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
		6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri secara tepat waktu	100%

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri	
1 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri	Rp736.110.000,00
2 Penyusunan Rekomendasi Persetujuan Atas Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi RPUU di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri	Rp4.500.000,00
3 Penyusunan Rekomendasi Terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Diikuti oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri	Rp89.752.000,00
4 Pelaksanaan Fungsi-Fungsi lain yang Diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian	Rp19.638.000,00
Total Anggaran	Rp850.000.000,00

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Perekonomian

  
Agustina Murbaningsih

Jakarta, 29 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri

  
Abdul Muis



SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ida Dwi Nilasari

Jabatan : Asisten Deputy Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian,  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Agustina Murbaningsih

Jabatan : Deputy Bidang Perekonomian

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Januari 2016

Pihak Kedua,

Deputy Bidang Perekonomian

Pihak Pertama,

Asisten Deputy Bidang Ketahanan Pangan,  
Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Agustina Murbaningsih

Ida Dwi Nilasari

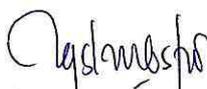
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**ASISTEN DEPUTI BIDANG KETAHANAN PANGAN,**  
**PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%
		2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang disusun secara tepat waktu	100%
		3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%
		4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang disusun secara tepat waktu	100%
		5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
		6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara tepat waktu	100%

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
1. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp665.798.000,00
2. Penyusunan Rekomendasi Persetujuan Atas Permohonan Izin Prakarsa dan substansi RPUU di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp87.120.000,00
3. Penyusunan Rekomendasi terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Diikuti oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp97.082.000,00
Total Anggaran	Rp850.000.000,00

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Perekonomian

  
Agustina Murbaningsih

Jakarta, 29 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan

  
Ida Dwi Nilasari



SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Teguh Supriyadi

Jabatan : Asisten Deputy Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda,  
dan Olahraga

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Surat Indrijarso

Jabatan : Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan  
Kebudayaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Deputy Bidang Pembangunan Manusia  
dan Kebudayaan

Jakarta, 29 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Asisten Deputy Bidang Agama,  
Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga

Surat Indrijarso

Teguh Supriyadi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**ASISTEN DEPUTI BIDANG AGAMA, KESEHATAN,**  
**PEMUDA, DAN OLAHRAGA**

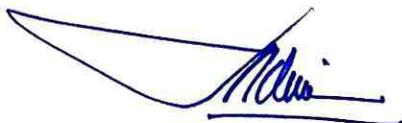
No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%
		2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang disusun secara tepat waktu	100%
		3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%
		4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang disusun secara tepat waktu	100%
		5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
		6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang disusun secara tepat waktu	100%

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga	
1. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga	Rp614.202.000,00
2. Penyusunan Rekomendasi Persetujuan Atas Permohonan Izin Prakarsa dan substansi RPUU di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga	Rp188.018.000,00
3. Penyusunan Rekomendasi terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Diikuti oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga	Rp97.780.000,00
<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp900.000.000,00</b>

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Pembangunan Manusia  
dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet

Jakarta, 29 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang Agama,  
Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga



Surat Indrijarso



Teguh Supriyadi



SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herman Suranto

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Surat Indrijarso

Jabatan : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan  
Kebudayaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Pembangunan Manusia  
dan Kebudayaan

Surat Indrijarso

Jakarta, 29 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang Pendidikan,  
Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Herman Suranto

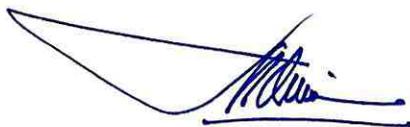
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**ASISTEN DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,**  
**RISET, DAN TEKNOLOGI**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%
		2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang disusun secara tepat waktu	100%
		3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%
		4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang disusun secara tepat waktu	100%
		5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
		6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang disusun secara tepat waktu	100%
2.	Terwujudnya Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi yang Berkualitas di Lingkungan Kedepatian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedepatian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disusun secara tepat waktu	100%

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	
1. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Rp541.709.000,00
2. Penyusunan Rekomendasi Persetujuan Atas Permohonan Izin Prakarsa dan substansi RPUU di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Rp58.278.000,00
3. Penyusunan Rekomendasi terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Rp29.163.000,00
4. Penyusunan Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Rp170.850.000,00
Total Anggaran	Rp800.000.000,00

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Pembangunan Manusia  
dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet



Surat Indrijarso

Jakarta, 27 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang Pendidikan,  
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Herman Suranto



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ari Purwanto

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan,  
Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan  
Perlindungan Anak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Surat Indrijarso

Jabatan : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan  
Kebudayaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Januari 2016

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Bidang Penanggulangan  
Kemiskinan, Perlindungan Sosial,  
Pemberdayaan Perempuan, dan  
Perlindungan Anak

Pihak Kedua,

Deputi Bidang Pembangunan Manusia  
dan Kebudayaan

Surat Indrijarso

Ari Purwanto

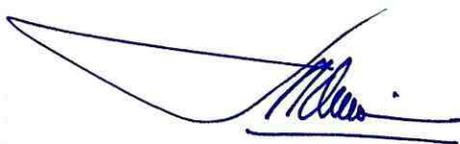
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**ASISTEN DEPUTI BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN,**  
**PERLINDUNGAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%
		2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disusun secara tepat waktu	100%
		3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%
		4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disusun secara tepat waktu	100%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
		5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%
		6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disusun secara tepat waktu	100%

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
1. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Rp494.510.000,00
2. Penyusunan Rekomendasi Persetujuan Atas Permohonan Izin Prakarsa dan substansi RPUU di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Rp107.054.000,00
3. Penyiapan Analisis dan Pengolahan Materi Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	Rp198.436.000,00
Total Anggaran	Rp800.000.000,00

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Pembangunan Manusia  
dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet



Surat Indrijarso

Jakarta, 29 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang Penanggulangan  
Kemiskinan, Perlindungan Sosial,  
Pemberdayaan Perempuan, dan  
Perlindungan Anak



Ari Purwanto



SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahayu Kadarwati

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Surat Indrijarso

Jabatan : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Pembangunan Manusia  
dan Kebudayaan

Surat Indrijarso

Jakarta, 29 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang Pembangunan  
Desa, Daerah Tertinggal,  
dan Transmigrasi

Rahayu Kadarwati

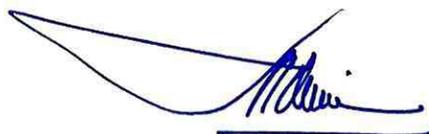
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH**  
**TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%
		2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disusun secara tepat waktu	100%
		3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%
		4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disusun secara tepat waktu	100%
		5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
		6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disusun secara tepat waktu	100%

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	
1. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Rp208.665.000,00
2. Penyusunan Rekomendasi Persetujuan Atas Permohonan Izin Prakarsa dan substansi RPUU di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Rp100.585.000,00
3. Penyusunan Rekomendasi terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Rp490.750.000,00
Total Anggaran	Rp800.000.000,00

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Pembangunan Manusia  
dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet



Surat Indrijarso

Jakarta, 29 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang Pembangunan  
Desa, Daerah Tertinggal, dan  
Transmigrasi



Rahayu Kadarwati



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dyah Kusumastuti

Jabatan : Asisten Deputy Bidang Kelautan dan Perikanan  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ratih Nurdiati

Jabatan : Deputy Bidang Kemaritiman  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Deputy Bidang Kemaritiman

Ratih Nurdiati

Jakarta, 29 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Asisten Deputy Bidang Kelautan  
dan Perikanan

Dyah Kusumastuti

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**ASISTEN DEPUTI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Kelautan dan Perikanan	1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%
		2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang disusun secara tepat waktu	100%
		3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Kelautan dan Perikanan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%
		4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Kelautan dan Perikanan yang disusun secara tepat waktu	100%
		5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Kelautan dan Perikanan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%
		6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Kelautan dan Perikanan yang disusun secara tepat waktu	100%

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Kelautan dan Perikanan	
1. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp565.292.000,00
2. Penyusunan Rekomendasi terkait Persetujuan Permohonan Izin Prakarsa dan substansi RPUU di Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp43.176.000,00
3. Penyiapan Rekomendasi terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp41.532.000,00
Total Anggaran	Rp650.000.000,00

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Kemaritiman



Ratih Nurdiati

Jakarta, 29 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan



Dyah Kusumastuti



SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Hamidi Rahmat

Jabatan : Asisten Deputy Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ratih Nurdiati

Jabatan : Deputy Bidang Kemaritiman

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Deputy Bidang Kemaritiman

Ratih Nurdiati

Jakarta, 29 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Asisten Deputy Bidang Energi dan  
Sumber Daya Mineral

M. Hamidi Rahmat

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016  
ASISTEN DEPUTI BIDANG ENERGI DAN  
SUMBER DAYA MINERAL**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%
		2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang disusun secara tepat waktu	100%
		3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%
		4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang disusun secara tepat waktu	100%
		5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%
		6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang disusun secara tepat waktu	100%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
2.	Terwujudnya Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi yang Berkualitas di Lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman	Persentase penyelesaian dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman secara tepat waktu	100%

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	
1. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp706.926.000,00
2. Penyusunan Rekomendasi Terkait Persetujuan Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan PUU di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp13.000.000,00
3. Penyusunan Rekomendasi Terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp63.484.000,00
4. Penyusunan Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman	Rp116.090.000,00
Total Anggaran	Rp900.000.000,00

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Kemaritiman



Ratih Nurdiati

Jakarta, 29 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang Energi dan  
Sumber Daya Mineral



M. Hamidi Rahmat



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syafruddin

Jabatan : Asisten Deputy Bidang Perhubungan  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ratih Nurdiati

Jabatan : Deputy Bidang Kemaritiman  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Deputy Bidang Kemaritiman

Ratih Nurdiati

Jakarta, 29 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Asisten Deputy Bidang Perhubungan

Syafruddin

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**ASISTEN DEPUTI BIDANG PERHUBUNGAN**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Perhubungan	1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Perhubungan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%
		2. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Perhubungan yang disusun secara tepat waktu	100%
		3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Perhubungan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%
		4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Perhubungan yang disusun secara tepat waktu	100%
		5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perhubungan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%
		6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perhubungan yang disusun secara tepat waktu	100%

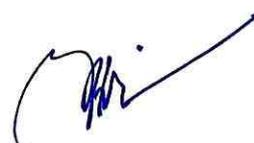
Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Perhubungan	
1. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	Rp451.811.000,00
2. Penyusunan Rekomendasi terkait Persetujuan Permohonan Izin Prakarsa dan substansi RPUU di Bidang Perhubungan	Rp105.077.000,00
3. Penyiapan Rekomendasi terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perhubungan	Rp93.112.000,00
Total Anggaran	Rp650.000.000,00

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Kemaritiman



Ratih Nurdiati

Jakarta, 29 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang Perhubungan



Syafruddin



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Arief Khumaidi

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan  
Teknologi, dan Lingkungan Maritim

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ratih Nurdiati

Jabatan : Deputi Bidang Kemaritiman

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Kemaritiman

Ratih Nurdiati

Jakarta, 29 Januari 2016

Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang Kepariwisata,  
Riset dan Teknologi, dan Lingkungan  
Maritim

M. Arif Khumaidi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**ASISTEN DEPUTI BIDANG KEPARIWISATAAN, RISET DAN**  
**TEKNOLOGI, DAN LINGKUNGAN MARITIM**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%
		2. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang disusun secara tepat waktu	100%
		3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%
		4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang disusun secara tepat waktu	100%
		5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
		6. Persentase penyiapan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim secara tepat waktu	100%

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	
1. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	Rp1.399.360.000,00
2. Penyusunan Rekomendasi Terkait Persetujuan Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan PUU di Bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	Rp81.280.000,00
3. Penyusunan Rekomendasi Terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin Dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	Rp69.360.000,00
Total	Rp1.550.000.000,00

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Kemaritiman



Ratih Nurdiati

Jakarta, 29 Januari 2016

Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim



M. Arief Khumaidi



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Thanon Aria Dewangga

Jabatan : Asisten Deputy Bidang Penyelenggaraan Persidangan selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yuli Harsono

Jabatan : Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Deputy Bidang  
Dukungan Kerja Kabinet

Yuli Harsono

Jakarta, 27 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Asisten Deputy Bidang Penyelenggaraan  
Persidangan

Thanon Aria Dewangga

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**ASISTEN DEPUTI BIDANG PENYELENGGARAAN**  
**PERSIDANGAN**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Persidangan Kabinet dan Administrasi Penyiapan Bahan-Bahan Sidang Kabinet Maupun Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden	1. Persentase penyelesaian penyusunan jadwal dan agenda sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden secara tepat waktu	100%
		2. Persentase penyelesaian Laporan Persiapan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden secara tepat waktu	100%
		3. Persentase penyelesaian Laporan Penyelenggaraan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden secara tepat waktu	100%
		4. Persentase pendistribusian bahan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden secara tepat waktu	100%
		5. Persentase kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet	100%

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Penyelenggaraan Teknis dan Administrasi Penyiapan Bahan-Bahan Sidang Kabinet Maupun Rapat atau Pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	
1. Perencanaan Sidang Kabinet maupun Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	Rp550.712.000,00
2. Pelaksanaan dan Perlengkapan Sidang Kabinet maupun Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	Rp2.913.689,000,00
3. Penyiapan Bahan Sidang Kabinet maupun Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	Rp380.069.000,00
Total	Rp3.844.470.000,00

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang  
Dukungan Kerja Kabinet



Yuli Harsono

Jakarta, 29 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan  
Persidangan



Thanon Aria Dewangga



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heru Priyantono

Jabatan : Asisten Deputy Bidang Pelaporan Persidangan  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yuli Harsono

Jabatan : Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Deputy Bidang Dukungan  
Kerja Kabinet

Jakarta, 29 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Asisten Deputy Bidang  
Pelaporan Persidangan

Yuli Harsono

Heru Priyantono

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**ASISTEN DEPUTI BIDANG PELAPORAN PERSIDANGAN**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelaporan Sidang Kabinet Maupun Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden	1. Persentase penyelesaian perekaman audio dan visual serta transkripsi sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden secara tepat waktu	100%
		2. Persentase penyelesaian risalah sidang kabinet dan Arahan Petunjuk Presiden pada sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden secara tepat waktu	100%
		3. Persentase kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet	100%
2.	Terwujudnya Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi yang Berkualitas di Lingkungan Kedeputian Dukungan Kerja Kabinet	Persentase penyelesaian dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet secara tepat waktu	100%

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pelaporan Sidang Kabinet Maupun Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri Presiden	
1. Perekaman dan Transkripsi Sidang Kabinet maupun Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden	Rp532.346.000,00
2. Penyusunan, Pengelolaan, Pendistribusian dan Publikasi Risalah Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden	Rp427.452.000,00
3. Penyelesaian Dokumen Program, Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputan Dukungan Kerja Kabinet	Rp289.981.000,00
4. Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Lain yang Diberikan oleh Deputi Dukungan Kerja Kabinet	Rp794,751,000,00
Total Anggaran	Rp2.044.530.000,00

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang  
Dukungan Kerja Kabinet



Yuli Harsono

Jakarta, 29 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang  
Pelaporan Persidangan



Heru Priyanto



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eko Harnowo

Jabatan : Asisten Deputy Bidang Naskah dan Terjemahan  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yuli Harsono

Jabatan : Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Deputy Bidang Dukungan  
Kerja Kabinet

Jakarta, 29 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Asisten Deputy Bidang  
Naskah dan Terjemahan

Yuli Harsono

Eko Harnowo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**ASISTEN DEPUTI BIDANG NASKAH DAN TERJEMAHAN**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Penyiapan Naskah Dokumen Kepresidenan dan Kenegaraan serta Penerjemahan	1. Persentase penyelesaian Naskah Dokumen Kepresidenan/Kenegaraan yang ditindaklanjuti	100%
		2. Persentase penyelesaian Terjemahan Naskah Dokumen Kepresidenan/Kenegaraan secara tepat waktu	100%
		3. Persentase penyelesaian Dokumen Negara dari Hasil Pencatatan Verbatim Pidato/Sambutan Presiden RI secara tepat waktu	100%
2.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah	1. Persentase Pejabat Fungsional Penerjemah yang dibina sesuai rencana	100%
		2. Persentase tersusunnya Dokumen Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah sesuai rencana	100%

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Penyiapan Naskah Dokumen Kepresidenan dan Kenegaraan serta Penerjemahan	
1. Penyiapan Naskah Surat, Dokumen, dan Produk Resmi Kepresidenan/Kenegaraan	Rp65.238.000,00
2. Pelaksanaan Penerjemahan Lisan atas Surat, Dokumen, dan Produk Resmi Kepresidenan/Kenegaraan dan Pimpinan	Rp130.640.000,00
3. Pelaksanaan Dukungan Fasilitasi Penerjemah dan Dokumentasi Penerjemah	Rp43.342.000,00
4. Pelaksanaan Pencatatan secara Verbatim Pidato Presiden Republik Indonesia	Rp.296.710.000,00
5. Pengoordinasian Proses Administrasi Pengangkatan Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Kembali, serta Pemberhentian dari Jabatan	Rp.11.250.000,00
6. Pengoordinasian Proses Penilaian dan Penetapan Angka Kredit	Rp.35.800.000,00
7. Pengoordinasian Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penjenjangan Penerjemah	Rp.1.600.000.000,00
8. Pengoordinasian Pengembangan dan Evaluasi Kinerja Penerjemah dan Unit Kerja Penerjemah	Rp173.544.000,00
9. Pengelolaan Informasi dan Sosialisasi Jabatan Fungsional Penerjemah	Rp254.476.000,00
Total Anggaran	Rp2.611.000.000,00

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang  
Dukungan Kerja Kabinet

  
Yuli Harsono

Jakarta, 29 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang  
Naskah dan Terjemahan

  
Eko Harnowo



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Al Furkon Setiawan

Jabatan : Asisten Deputy Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yuli Harsono

Jabatan : Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Deputy Bidang  
Dukungan Kerja Kabinet

Yuli Harsono

Jakarta, 27 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Asisten Deputy Bidang Hubungan  
Masyarakat dan Protokol

Al Furkon Setiawan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016  
ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN  
KEMASYARAKATAN DAN PROTOKOL**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Hubungan Kemasyarakatan serta Koordinasi dan Penyiapan Keprotokolan Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri Sekretaris Kabinet	1. Persentase penyelesaian pengelolaan informasi secara tepat waktu	100%
		2. Persentase kepuasan terhadap penyebarluasan informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet	100%
		3. Persentase kepuasan terhadap layanan keprotokolan kepada Sekretaris Kabinet dalam rangka dukungan kegiatan yang dihadiri oleh Presiden	100%

Kegiatan	Anggaran
Dukungan hubungan kemasyarakatan serta koordinasi dan penyiapan keprotokolan Rapat, pertemuan atau kegiatan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet serta koordinasi pelaksanaan keprotokolan rapat dan/atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden	
1. Penyusunan Strategi Humas, Peliputan dan Pengolahan Informasi, serta Pemantauan Media	Rp1.665.072.000,00
2. Penyebarluasan dan pelayanan informasi, pengelolaan media, serta penyelenggaraan koordinasi humas	Rp1.281.545.000,00
3. Pelayanan Keprotokolan dan Dukungan Administrasi Acara Sekretaris Kabinet, serta Koordinasi Antar Kesekretariatan Kementerian/Lembaga	Rp1.665.453.000,00
Total Anggaran	Rp4.612.070.000,00

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Dukungan  
Kerja Kabinet



Yuli Harsono

Jakarta, 29 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang Hubungan  
Kemasyarakatan dan Protokol



Al Furkon Setiawan



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Islachuddin

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Farid Utomo

Jabatan : Deputy Bidang Administrasi  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Deputy Bidang Administrasi

Farid Utomo

Jakarta, 27 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Islachuddin

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Pengelolaan Perencanaan Program dan Anggaran yang berkualitas	1. Persentase penyelesaian dokumen program dan anggaran secara tepat waktu	100%
		2. Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	100%
2.	Pengelolaan Keuangan yang Tepat, Transparan dan Akuntabel	1. Kualitas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet berdasarkan Opini Badan Pemeriksa Keuangan	WTP
		2. Persentase tersusunnya Laporan Keuangan secara tepat waktu	100%
		3. Persentase ketepatan verifikasi atas dokumen Surat Perintah Membayar	100%
		4. Persentase tersusunnya dokumen penyelesaian kerugian negara di Sekretariat Kabinet secara tepat waktu	100%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
3.	Pengelolaan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran yang berkualitas	1. Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet	85%
		2. Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan	60%

#### Kegiatan

#### Anggaran

Dukungan Manajemen Perencanaan dan Keuangan serta Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Kabinet

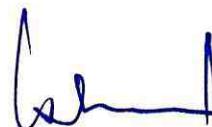
- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Pengoordinasian, Penyusunan, Penelahaan, dan Pembahasan Proker 2017 dan 2018, ADIK, Renja, RKA, dan DIPA tahun 2017 serta Renstra Eselon I dan Eselon II Tahun 2015-2019. | Rp681.638.000,00 |
| 2. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Administrasi (Kode Komponen 713)   | Rp612.820.000,00 |
| 3. Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Teknis dan Administrasi Pelaksanaan Anggaran   | Rp200.550.000,00 |
| 4. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan  | Rp202.350.000,00 |
| 5. Pengoordinasian Penyelesaian Kerugian Negara  | Rp39.570.000,00  |
| 6. Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Lain yang Diberikan oleh Deputi Bidang Administrasi (Kode Komponen 717)   | Rp300.760.000,00 |
| 7. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (Kode Komponen 002)  | Rp576.240.000,00 |

Kegiatan	Anggaran
8. Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun Berjalan di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Rp329.956.000,00
9. Pelaksanaan Pengoordinasian, Penelaahan, Pembahasan, dan Penyusunan Revisi DIPA dan POK DIPA	Rp234.950.000,00
10. Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Lain yang Diberikan oleh Deputi Bidang Administrasi (Kode Komponen 720)	Rp 459.474.000,00
Total Anggaran	Rp3.638.308.000,00

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Administrasi

  
Farid Utomo

Jakarta, 29 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

  
Islachuddin



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ratih Mayangsari

Jabatan : Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan  
Tata Laksana

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Farid Utomo

Jabatan : Deputy Bidang Administrasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Januari 2016

Pihak Kedua,  
Deputy Bidang Administrasi

Pihak Pertama,  
Kepala Biro Sumber Daya Manusia,  
Organisasi dan Tata Laksana

Farid Utomo

Ratih Mayangsari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN**  
**TATA LAKSANA**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	1. Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kepegawaian	100%
		2. Persentase terselesaikannya dokumen terkait dengan administrasi Kepegawaian secara tepat waktu	100%
		3. Persentase layanan pembayaran gaji dan tunjangan yang dilaksanakan	100%
2.	Terwujudnya Pengembangan Kapasitas Pegawai yang Berkualitas	Persentase terselenggaranya pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi	100%
3.	Terwujudnya Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana yang Berkualitas	Persentase penyelesaian pengkajian organisasi dan ketatalaksanaan yang telah ditindaklanjuti	100%

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana di Lingkungan Sekretariat Kabinet	
1. Perencanaan dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Rp141.060.000,00
2. Penyelenggaraan dan pengadministrasian pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun Aparatur Sipil Negara dan pegawai, lainnya yang wewenang penetapannya berada di tangan Sekretaris Kabinet	Rp132.200.000,00
3. Pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan tugas untuk penyiapan pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Jabatan Pimpinan Tinggi Utama	Rp1.197.380.000,00
4. Penyiapan dan penyelesaian administrasi lainnya bagi Aparatur Sipil Negara dan pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet	Rp36.110.000,00
5. Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Deputi Bidang Administrasi (Kode Komponen 705)	Rp73.770.000,00
6. Perencanaan, pelaksanaan, dan kerja sama dalam pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet	Rp3.836.383.000,00
7. Pembinaan Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet	Rp191.164.000,00
8. Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Deputi Bidang Administrasi (Kode Komponen 708)	Rp93.800.000,00
9. Pengkajian dan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Kabinet	Rp482.050.000,00

Kegiatan	Anggaran
10. Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Deputi Bidang Administrasi (Kode Komponen 710)	Rp63.110.000,00
11. Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Rp98.857.856.000,00
12. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Rp3.134.256.000,00
Total Anggaran	Rp108.239.139.000,00

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Administrasi



Farid Utomo

Jakarta, 27 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Kepala Biro Sumber Daya Manusia,  
Organisasi dan Tata Laksana



Ratih Mayangsari



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Beben Hurmansyah  
Jabatan : Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Farid Utomo  
Jabatan : Deputy Bidang Administrasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Deputy Bidang Administrasi

Farid Utomo

Jakarta, 29 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja  
dan Reformasi Birokrasi

Beben Hurmansyah

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**BIRO AKUNTABILITAS KINERJA DAN**  
**REFORMASI BIROKRASI**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet	1. Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Kabinet	B
		2. Persentase tingkat pemanfaatan dokumen akuntabilitas kinerja	82%
		3. Persentase dokumen akuntabilitas kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100%
2.	Terwujudnya Dukungan Manajemen Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet yang Berkualitas	1. Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	67
		2. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Sekretariat Kabinet	77,5
		3. Persentase dokumen reformasi birokrasi yang diselesaikan tepat waktu	100%
3.	Terwujudnya Dukungan Pengendalian Persuratan dan Ketatausahaan Pimpinan di Lingkungan Sekretariat Kabinet	1. Persentase kepuasan layanan persuratan dan ketatausahaan pimpinan	72%
		2. Persentase pelaksanaan pendistribusian surat yang tepat waktu dan tepat sasaran	100%

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen Kinerja Organisasi dan Individu, Reformasi Birokrasi, serta Pengendalian Persuratan dan Ketatausahaan Pimpinan	
1. Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tingkat Deputi Bidang Administrasi dan Sekretariat Kabinet	Rp55.000.000,00
2. Pelaksanaan Koordinasi Pengumpulan Data Kinerja dan Pengukuran Kinerja Organisasi	Rp104.350.000,00
3. Pelaksanaan Kajian dan Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja	Rp144.238.000,00
4. Pelaksanaan Pemantauan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Organisasi	Rp58.900.000,00
5. Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Kinerja Individu	Rp30.550.000,00
6. Pelaksanaan Pengelolaan Pemantauan dan Evaluasi Penilaian Kinerja Individu di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Rp20.250.000,00
7. Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan, Penelaahan, dan Pembahasan Perencanaan Program dan Kegiatan RB di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Rp13.200.000,00
8. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi, Pengoordinasian Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan RB di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Rp20.850.000,00
9. Mengoordinasikan Pelaksanaan Manajemen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2016	Rp152.850.000,00
10. Pengkajian dan Pengembangan RB di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Rp241.819.000,00
11. Dukungan Pelayanan Teknis dan Administrasi Ketatausahaan di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Rp467.430.000,00
Total Anggaran	Rp1.309.437.000,00

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Administrasi

  
Farid Utomo

Jakarta, 27 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja  
dan Reformasi Birokrasi

  
Beben Hurmansyah



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Temon  
Jabatan : Kepala Biro Umum  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Farid Utomo  
Jabatan : Deputi Bidang Administrasi  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Administrasi

Jakarta, 29 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Kepala Biro Umum

  
Farid Utomo

  
Temon

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016  
BIRO UMUM**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(3)
1.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Manajemen Pengadaan, Pengelolaan Barang Milik Negara, Pemeliharaan, Perlengkapan dan Jamuan, serta Pelayanan Umum Lainnya di Lingkungan Sekretariat Kabinet	1. Persentase kesesuaian paket pengadaan barang dan jasa dengan rencana pengadaan	85%
		2. Persentase akurasi laporan BMN yang dijadikan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban akan pelaksanaan pengelolaan BMN	100%
		3. Persentase kesesuaian pemeliharaan BMN dengan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMN	85%
		4. Persentase permintaan layanan perlengkapan dan jamuan yang ditindaklanjuti	100%
		5. Persentase kepuasan layanan pengadaan, pengelolaan barang milik negara, pemeliharaan, perlengkapan dan jamuan, serta pelayanan umum lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet	85%

Kegiatan	Anggaran
Pelaksanaan Pelayanan Pengadaan, Pengelolaan Barang Milik Negara, Pemeliharaan, Perlengkapan dan Jamuan Pelayanan Umum Lainnya di Lingkungan Sekretariat Kabinet	
1. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Rp118.100.000,00
2. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Rp918.978.000,00
3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Rp40.925.000,00
4. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa	Rp168.654.000,00
5. Perencanaan dan Pengolahan Data Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	Rp22.450.000,00
6. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	Rp405.150.000,00
7. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	Rp209.724.000,00
8. Penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN)	Rp90.150.000,00
9. Perencanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan dan Barang Dan Bangunan serta Alat Pengolah Data	Rp5.850.000,00
10. Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan dan Barang Dan Bangunan serta Alat Pengolah Data	Rp868.147.000,00
11. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan dan Barang dan Bangunan serta Alat Pengolah Data	Rp1.950.000,00
12. Perencanaan Pelayanan Perlengkapan dan Jamuan	Rp14.600.000,00
13. Pelaksanaan Pelayanan Perlengkapan dan Jamuan	Rp933.747.000,00
14. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perlengkapan dan Jamuan	Rp58.400.000,00
15. Dukungan Pelayanan Pimpinan	Rp38.836.000,00
16. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Rp24.970.191.000,00

Kegiatan	Anggaran
17. Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4	Rp11.271.735.000,00
18. Pengadaan Alat Pengolah Data	Rp590.070.000,00
19. Pengadaan Peralatan Kantor, Peralatan, dan Mesin	Rp1.861.538.000,00
20. Pengadaan Meubelair	Rp513.000.000,00
Total Anggaran	Rp43.102.195.000,00

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Administrasi



Farid Utomo

Jakarta, 29 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Kepala Biro Umum



Temon



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wawan Gunawan  
Jabatan : Inspektur  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Pramono Anung  
Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

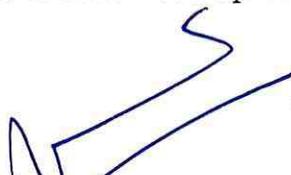
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Januari 2016

Pihak Kedua,  
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Pihak Pertama,  
Inspektur

  
Pramono Anung

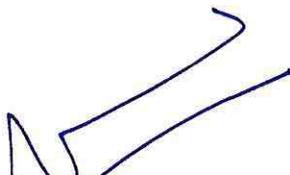
  
Wawan Gunawan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016  
INSPEKTORAT SEKRETARIAT KABINET**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hasil Pengawasan pada Satuan Organisasi/Unit Kerja di Sekretariat Kabinet	1. Persentase penyelesaian tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan	90%
		2. Persentase ketepatan waktu penerbitan Laporan Hasil Pengawasan	85%
		3. Nilai akuntabilitas kinerja Sekretariat Kabinet	Kategori "B"
		4. Jumlah unit kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori "BB"	3 unit kerja
		5. Opini BPK	WTP
		6. Jumlah unit kerja yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	3 unit kerja
		7. Nilai PMPRB	Kategori "Sangat Baik"

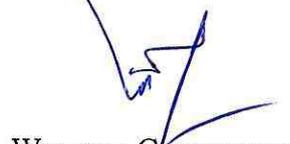
Kegiatan	Anggaran
Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Sekretariat Kabinet	
1. Penyiapan Perumusan Kebijakan Pengawasan Internal	Rp12.000.000,00
2. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kinerja dan Keuangan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan Lainnya	Rp345.698.000,00
3. Pelaksanaan Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu atas Penugasan Sekretaris Kabinet	Rp35.250.000,00
4. Pelaporan Hasil Pengawasan	Rp24.000.000,00
5. Pelaksanaan Penyusunan Program Kerja, Pengawasan, Laporan Pelaksanaan Pengawasan, dan Dukungan Pelayanan Administrasi Kegiatan Pengawasan, serta Pendokumentasian Laporan Hasil Pemeriksaan	Rp36.000.000,00
6. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Pimpinan Sekretariat Kabinet dan/atau Deputi Bidang Administrasi.	Rp547.052.000,00
Total Anggaran	Rp1.000.000.000,00

Pihak Kedua,  
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia



Prayono Anung

Jakarta, 29 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Inspektur



Wawan Gunawan



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suwanto

Jabatan : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Pramono Anung

Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Pramono Anung

Jakarta, 29 Januari 2016

Pihak Pertama,  
Kepala Pusat Data dan  
Teknologi Informasi

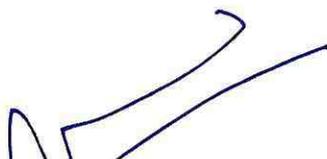
Suwanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016  
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya peningkatan layanan Sistem dan Teknologi Informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet	1. Persentase kepuasan pengguna terhadap sistem informasi yang diimplementasikan	80%
		2. Persentase keberlangsungan layanan ( <i>continuity of service</i> )	99%
		3. Jumlah pengakses layanan <i>website</i> Sekretariat Kabinet	1.900.000 pengakses
		4. Jumlah <i>Download</i> layanan data/informasi Sekretariat Kabinet	800.000 <i>download</i>
		5. Persentase kepuasan pengakses terhadap layanan <i>website</i> Sekretariat Kabinet	90 %
2.	Terwujudnya Layanan Arsip dan Kepustakaan yang Baik	1. Jumlah arsip yang dikelola	2.000 berkas
		2. Jumlah pengunjung perpustakaan	1.472 pengunjung

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen Data, Teknologi Informasi, Kearsipan, dan Perpustakaan	
1. Penyelenggaraan Pengembangan dan Penerapan Teknologi dan Sistem Informasi	Rp626.004.000,00
2. Pembinaan serta Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Informasi	Rp128.592.000,00
3. Pengembangan Infrastruktur dan Jaringan	Rp1.335.970.000,00
4. Pemeliharaan Infrastruktur dan Jaringan	Rp194.040.000,00
5. Penyelenggaraan Pengelolaan dan Penyebarluasan Data dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Persidangan, dan Kepegawaian serta Data dan Informasi Lainnya	Rp924.338.000,00
6. Penyelenggaraan Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi	Rp 238.374.000,00
7. Penyelenggaraan Pengelolaan Perpustakaan	Rp 146.936.000,00
8. Penyelenggaraan Tata Usaha	Rp 50.016.000,00
9. Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Perkantoran	Rp 2.433.554.000,00
Total Anggaran	Rp. 6.077.824.000,00

Pihak Kedua,  
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia



Pramono Anung

Jakarta, 29 Januari 2016  
Pihak Pertama,  
Kepala Pusat Data dan  
Teknologi Informasi



Suwanto